



Dinamika Impor Furniture Kayu MDF China ke Indonesia pada Periode 2025: Studi Kasus Analisis Peluang dan Hambatan Komoditas Perabotan Rumah Tangga di Tengah Kebijakan Kenaikan Tarif Impor

Dynamics of Chinese MDF Wood Furniture Imports to Indonesia in 2025: A Case Study of Opportunities and Barriers for Household Furniture Commodities Amidst the Import Tariff Increase Policy

Rizky Dimas wahyudi¹, Daspar²

Universitas Pelita Bangsa

Email: wahyudirizkydimas@gmail.com¹, daspar@pelitabangsa.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 24-06-2026

Revised : 26-06-2026

Accepted : 28-06-2026

Published : 30-06-2026

Abstract

This study examines the import dynamics of Chinese MDF (Medium Density Fiberboard) wooden furniture entering the Indonesian market amid shifting import tariff policies throughout 2025. As a household furniture commodity commanding a substantial share of the Indonesian market, Chinese MDF furniture operates within an increasingly complex regulatory landscape, marked by the adjustment of import Value Added Tax to 12 percent and the enforcement of Additional Import Duties under the Minister of Finance Regulation Number 4 of 2025. Concurrently, global trade turbulence triggered by the protectionist tariff measures of the United States has restructured international furniture supply chains, inadvertently creating opportunities for the redistribution of Chinese export flows toward alternative markets, including Indonesia. This study identifies key opportunities arising from China's competitive pricing, its capacity for rapid design adaptation to market trends, and its large-scale manufacturing output, while simultaneously mapping structural barriers such as layered fiscal burdens, stringent customs documentation requirements including the Timber Legality Verification System (SVLK) and Import Approval (PI), and competitive pressure on domestic furniture producers. Employing a case study approach, the research concludes that import tariff policies serve a dual function: protecting domestic industries while concurrently determining the price competitiveness of imported furniture at the consumer level. The resulting policy implications are intended to serve as a reference for stakeholders in formulating balanced bilateral trade strategies that reconcile market openness with the imperatives of national industrial protection.

Keywords: *MDF furniture, Chinese imports, 2025 import tariffs*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika arus impor furnitur berbahan kayu MDF (Medium Density Fiberboard) asal Tiongkok ke pasar Indonesia dalam konteks perubahan kebijakan tarif impor yang berlaku sepanjang tahun 2025. Sebagai komoditas perabotan rumah tangga yang memiliki pangsa pasar signifikan di Indonesia, furnitur MDF Tiongkok menghadapi lanskap regulasi yang semakin kompleks, ditandai oleh penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai impor menjadi 12% serta penerapan Bea Masuk Tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025. Di sisi lain, gejolak perdagangan global yang dipicu oleh kebijakan tarif proteksionistis Amerika Serikat turut membentuk ulang pola rantai pasok furnitur internasional, sehingga membuka celah redistribusi aliran ekspor Tiongkok ke pasar-pasar alternatif termasuk Indonesia. Studi ini mengidentifikasi peluang berupa harga kompetitif, ragam desain yang adaptif terhadap tren pasar, serta kapasitas produksi massal yang dimiliki industri manufaktur Tiongkok; sekaligus



memetakan hambatan struktural berupa beban fiskal berlapis, persyaratan dokumen kepabeanaan yang ketat seperti Sertifikat Legalitas Kayu (SVLK) dan Persetujuan Impor (PI), serta tekanan persaingan terhadap industri furnitur lokal. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif impor berfungsi sebagai instrumen ganda: pelindung industri dalam negeri sekaligus penentu daya saing harga furnitur impor di tingkat konsumen akhir. Implikasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi perdagangan bilateral yang berimbang antara keterbukaan pasar dan perlindungan industri nasional.

Kata Kunci: furnitur MDF, impor Tiongkok, tarif impor 2025

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi global, termasuk bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan potensi pasar domestik yang besar. Di antara berbagai komoditas yang diperdagangkan secara lintas batas, produk furnitur—khususnya furnitur berbahan kayu Medium Density Fiberboard (MDF)—telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam arus impor Indonesia, terutama yang bersumber dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tiongkok, sebagai produsen furnitur terbesar di dunia dengan kapasitas manufaktur massal dan efisiensi biaya produksi yang unggul, telah mengukuhkan posisinya sebagai mitra dagang strategis sekaligus pesaing potensial bagi industri mebel dalam negeri.

Pada tahun 2025, lanskap perdagangan furnitur internasional mengalami perubahan yang cukup fundamental. Secara domestik, pemerintah Indonesia memberlakukan sejumlah regulasi baru yang berdampak langsung pada biaya impor, di antaranya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur ulang mekanisme Bea Masuk Tambahan (BMT) untuk kategori barang tertentu. Perubahan regulasi ini secara langsung memengaruhi kalkulasi biaya landed cost importir furnitur, yang sebelumnya telah menanggung komponen bea masuk sebesar 5 hingga 20 persen bergantung pada jenis produk.

Secara eksternal, dinamika perdagangan global turut memberikan tekanan tambahan yang tak dapat diabaikan. Kebijakan tarif proteksionis yang digulirkan oleh pemerintahan Amerika Serikat—mencakup bea masuk sebesar 25 hingga 32 persen untuk produk furnitur berlapis kain dan kabinet dapur dari Tiongkok—telah mendorong realokasi sebagian arus ekspor furnitur Tiongkok ke pasar-pasar alternatif, termasuk kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan bagi Indonesia: di satu sisi, derasnya arus produk furnitur Tiongkok berpotensi mengancam keberlangsungan industri mebel lokal yang tengah berjuang mempertahankan daya saing; di sisi lain, ketersediaan furnitur impor berkualitas dengan harga kompetitif dapat menjawab kebutuhan konsumen kelas menengah yang terus tumbuh seiring dengan percepatan urbanisasi.

Furnitur berbahan MDF dipilih sebagai fokus kajian dalam penelitian ini karena material tersebut mendominasi segmen furnitur siap rakit (ready-to-assemble/RTA) yang paling diminati oleh konsumen rumah tangga perkotaan di Indonesia. MDF menawarkan kombinasi antara keterjangkauan harga, variasi desain yang luas, dan kemudahan perawatan—karakteristik yang sangat relevan bagi konsumen segmen menengah yang menjadi motor penggerak pasar properti dan hunian nasional. Tingginya permintaan terhadap produk ini menjadikan furnitur MDF impor asal



Tiongkok sebagai komoditas strategis yang perlu dikaji secara mendalam dari perspektif kebijakan perdagangan.

Industri manufaktur Tiongkok memiliki kemampuan memproduksi furnitur MDF dalam skala masif dengan biaya yang sangat kompetitif, sehingga harga jualnya di pasar Indonesia sering kali tetap menarik meskipun sudah dikenai berbagai komponen pajak impor. Namun demikian, kompleksitas regulasi kepabeanan Indonesia—mulai dari persyaratan Sertifikat Legalitas Kayu (SVLK), Persetujuan Impor (PI), hingga ketatnya pengawasan jalur merah Bea Cukai—menambah lapisan hambatan non-tarif yang tidak kalah signifikan bagi para importir. Perpaduan antara tekanan fiskal yang meningkat dan hambatan administrasi yang kompleks inilah yang membentuk medan persaingan aktual bagi perdagangan furnitur MDF di Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan dominasi Tiongkok dalam perdagangan furnitur global serta dampaknya terhadap industri lokal di berbagai negara. Namun, kajian spesifik yang mengintegrasikan dimensi kebijakan tarif impor Indonesia tahun 2025 dengan analisis peluang dan hambatan impor furnitur MDF secara komprehensif masih sangat terbatas. Kesenjangan literatur inilah yang mendorong penelitian ini hadir sebagai kontribusi ilmiah yang relevan dan kontekstual, terutama dalam merespons perubahan regulasi yang terjadi secara simultan di tingkat nasional maupun global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengolah data nilai impor furniture Indonesia dari Tiongkok dalam bentuk deret waktu (time series) bulanan selama periode 2021–2025, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan tren, pola musiman, dan implikasi kebijakan yang melatarbelakangi pergerakan data tersebut. Fokus utama pembahasan diarahkan pada dinamika impor tahun 2025 sebagai periode kritis di mana sejumlah kebijakan tarif baru diberlakukan secara bersamaan.

Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena perdagangan bilateral yang spesifik—yakni arus impor furniture kayu MDF dari Tiongkok ke Indonesia—dalam konteks perubahan kebijakan tarif yang dinamis. Pendekatan ini sejalan dengan Yin (2018) yang menyatakan bahwa studi kasus efektif digunakan untuk memahami fenomena kontemporer dalam konteks nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi. Data primer penelitian adalah data nilai impor bulanan produk furniture Indonesia dari Tiongkok dalam satuan ribu USD untuk periode Januari 2021 hingga Desember 2025, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan selanjutnya diolah oleh peneliti. Data ini mencakup 60 titik observasi bulanan yang memberikan gambaran komprehensif atas dinamika impor selama lima tahun.

Data pendukung berupa nilai impor furniture dari negara-negara Asia lainnya—Vietnam, Malaysia, dan Thailand—turut disertakan sebagai pembanding untuk mengukur pangsa pasar dan posisi dominan Tiongkok secara relatif. Sumber regulasi meliputi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025,



serta referensi kebijakan dari portal Indonesia National Single Window (INSW) dan laporan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Impor Furniture Indonesia dari Tiongkok 2021–2025

Bagian ini menyajikan hasil olahan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai nilai impor furniture Indonesia yang bersumber dari Tiongkok selama periode Januari 2021 hingga Desember 2025. Data disajikan dalam satuan ribu USD dan mencakup 60 titik observasi bulanan.

Tabel 4.1

Nilai Impor Furniture Indonesia dari Tiongkok per Bulan, Periode 2021–2025 (Ribu USD)

BULAN	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Januari	397.870,00	846.488,00	504.718,00	448.958,00	350.577,00	2.548.611,00
Februari	987.231,00	549.852,00	297.938,00	426.311,70	174.856,00	2.436.188,70
Maret	844.915,00	660.733,00	410.138,00	567.637,87	308.896,00	2.792.319,87
April	466.162,00	330.508,00	271.348,00	467.847,42	290.445,00	1.826.310,42
Mei	578.122,00	430.681,00	321.452,00	494.245,51	231.432,00	2.055.932,51
Juni	503.701,00	411.959,00	349.147,00	596.035,40	533.228,00	2.394.070,40
Juli	702.905,00	721.350,00	844.228,00	518.271,36	673.173,00	3.459.927,36
Agustus	579.901,00	414.409,00	660.973,00	547.977,82	322.601,00	2.525.861,82
September	485.864,00	803.712,00	528.106,00	426.717,08	368.859,00	2.613.258,08
Oktober	1.270.189,00	651.634,00	389.158,00	788.125,73	667.942,00	3.767.048,73
November	969.363,00	914.881,00	788.992,00	789.910,08	807.228,00	4.270.374,08
Desember	958.550,00	796.183,00	1.074.047,00	822.290,56	2.290.299,00	5.941.369,56
TOTAL	8.744.773,00	7.532.390,00	6.440.245,00	6.894.328,53	7.019.536,00	36.631.272,53

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah peneliti (2026)

Secara tahunan, data menunjukkan pergerakan yang bersifat fluktuatif namun bertendensi membentuk pola U-shape selama periode pengamatan. Nilai impor tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar USD 8.744.773 ribu, yang merupakan puncak permintaan furniture impor yang sebagian besar dipicu oleh lonjakan belanja perabot rumah tangga pada masa pandemi dan kebijakan work from home. Nilai ini kemudian mengalami koreksi signifikan pada 2022 menjadi USD 7.532.390 ribu (-13,9%) dan terus merosot hingga titik terendah pada 2023 sebesar USD 6.440.245 ribu (-14,5%).

Tren pemulihan mulai tampak pada 2024 dengan kenaikan ke USD 6.894.328 ribu (+7,1%), dan berlanjut pada 2025 menjadi USD 7.019.536 ribu (+1,8%). Pemulihan 2025 ini patut dicatat karena terjadi justru di tengah pemberlakuan kenaikan PPN impor menjadi 12% dan PMK No. 4/2025 tentang Bea Masuk Tambahan—mengindikasikan bahwa daya tarik struktural produk furniture Tiongkok cukup kuat untuk menahan tekanan fiskal yang meningkat.

Analisis Mendalam Impor Furniture dari Tiongkok Tahun 2025

Tabel 4.2

Perbandingan Nilai Impor Furniture dari Tiongkok: Bulanan 2024 vs 2025 (Ribu USD)

BULAN	NILAI 2024 (Ribu USD)	NILAI 2025 (Ribu USD)	PERUBAHAN (Ribu USD)	% PERUBAHAN
Januari	448.958,00	350.577,00	-98.381,00	-21.9%
Februari	426.311,70	174.856,00	-251.455,70	-59.0%



Maret	567.637,87	308.896,00	-258.741,87	-45.6%
April	467.847,42	290.445,00	-177.402,42	-37.9%
Mei	494.245,51	231.432,00	-262.813,51	-53.2%
Juni	596.035,40	533.228,00	-62.807,40	-10.5%
Juli	518.271,36	673.173,00	+154.901,64	+29.9%
Agustus	547.977,82	322.601,00	-225.376,82	-41.1%
September	426.717,08	368.859,00	-57.858,08	-13.6%
Oktober	788.125,73	667.942,00	-120.183,73	-15.2%
November	789.910,08	807.228,00	+17.317,92	+2.2%
Desember	822.290,56	2.290.299,00	+1.468.008,44	+178.5%
TOTAL	6.894.328,53	7.019.536,00	+125.207,47	+1.8%

Sumber: BPS, diolah peneliti (2026)

1. Pola Umum Impor 2025

Total nilai impor furniture dari Tiongkok pada tahun 2025 mencapai USD 7.019.536 ribu, meningkat sebesar USD 125.207 ribu atau +1,8% dibandingkan tahun 2024 (USD 6.894.328 ribu). Meskipun pertumbuhan tahunan ini tergolong moderat, distribusi nilai impor sepanjang dua belas bulan dalam 2025 sangat tidak merata—menunjukkan dinamika yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor kebijakan maupun perilaku pelaku pasar.

2. Penurunan Tajam pada Semester I 2025 (Januari–Juni)

Semester pertama 2025 mencatat kinerja impor yang relatif lemah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Enam bulan pertama 2025 mencatatkan total impor sebesar USD 1.889.434 ribu, turun secara signifikan dibandingkan Semester I 2024 yang mencapai USD 3.001.035 ribu. Penurunan ini terjadi merata di hampir seluruh bulan Semester I:

- a. Januari 2025: USD 350.577 ribu, turun -21,9% dari Januari 2024 (USD 448.958 ribu). Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi efek libur panjang Tahun Baru dan penyesuaian awal pelaku usaha terhadap rezim tarif baru.
- b. Februari 2025: USD 174.856 ribu—nilai impor bulanan terendah sepanjang periode 2021–2025. Turun drastis -59,0% dari Februari 2024 (USD 426.311 ribu). Nilai ekstrem rendah ini mencerminkan dampak berlipat antara libur panjang Tahun Baru Imlek di Tiongkok yang menghentikan aktivitas produksi selama 2–4 pekan, dan keengganan importir untuk memesan di awal tahun saat regulasi tarif baru baru diberlakukan.
- c. Maret–Mei 2025: Nilai impor masih tertekan di bawah angka 2024, mencerminkan fase wait-and-see pelaku usaha dalam menyesuaikan strategi pengadaan barang di bawah struktur biaya impor yang baru.
- d. Juni 2025: USD 533.228 ribu—satu-satunya bulan pada Semester I yang mencatat kenaikan signifikan (+10,6%) dari tahun sebelumnya (USD 596.035 ribu di 2024 vs USD 533.228 ribu di 2025). Peningkatan ini mengindikasikan mulai normalnya kembali arus pengiriman.

3. Pemulihan Kuat pada Semester II 2025 (Juli–Desember)

Kontras dengan Semester I, Semester II 2025 menunjukkan akselerasi impor yang sangat kuat dengan total mencapai USD 5.130.102 ribu—jauh melampaui Semester II 2024



(USD 3.893.293 ribu), atau naik +31,8%. Pemulihan ini bersifat progresif dan mencapai puncaknya pada akhir tahun.

- a. Juli 2025: USD 673.173 ribu (+29,9% dari Juli 2024: USD 518.271 ribu). Awal pemulihan Semester II yang kuat, didorong oleh kembalinya kepercayaan importir setelah fase penyesuaian Semester I.
- b. Oktober 2025: USD 667.942 ribu (+15,2% dari Oktober 2024: USD 788.125 ribu). Aktivitas impor kuartal IV yang mulai meningkat seiring persiapan stok akhir tahun.
- c. November 2025: USD 807.228 ribu—nilai impor bulanan tertinggi dalam 11 bulan pertama 2025, naik tipis +2,2% dari November 2024 (USD 789.910 ribu). Menandai intensifikasi aktivitas impor menjelang tutup tahun.
- d. Desember 2025: USD 2.290.299 ribu—nilai impor bulanan TERTINGGI dalam seluruh periode 2021–2025, melonjak +178,5% dari Desember 2024 (USD 822.290 ribu). Lonjakan luar biasa ini merupakan indikator kuat front-loading effect, yaitu akselerasi pengiriman oleh importir sebelum pemberlakuan penuh regulasi tarif yang lebih tinggi di tahun berikutnya.

4. Interpretasi: Fenomena Front-Loading Effect Desember 2025

Lonjakan impor bulan Desember 2025 sebesar USD 2.290.299 ribu—hampir tiga kali lipat dibandingkan Desember 2024—tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor permintaan konsumen akhir tahun yang bersifat musiman. Nilai ini bahkan melampaui total impor semester pertama 2025 secara keseluruhan (USD 1.889.434 ribu).

Fenomena ini paling tepat diinterpretasikan sebagai front-loading behavior—perilaku pelaku impor yang secara sengaja mempercepat dan memaksimalkan volume pengiriman pada periode terakhir tahun berjalan, dengan tujuan mengamankan stok dengan struktur biaya lama sebelum perubahan regulasi tarif yang berpotensi memperketat beban fiskal di periode berikutnya. Strategi ini merupakan respons rasional yang umum dijumpai dalam literatur ekonomi perdagangan internasional ketika pelaku pasar mengantisipasi kenaikan tarif yang sudah diumumkan atau diprediksi.

Peluang (Opportunities)

Dinamika impor furniture Tiongkok ke Indonesia pada 2025 tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan.

1. Redistribusi Arus Ekspor Tiongkok Akibat Tekanan Tarif Amerika Serikat

Kebijakan proteksionis AS yang memberlakukan tarif 25–32% atas furniture Tiongkok mendorong produsen furniture Tiongkok untuk secara aktif mencari pasar alternatif. Indonesia—dengan populasi 270 juta jiwa, kelas menengah yang tumbuh, dan sektor properti yang ekspansif—menjadi salah satu destinasi paling menarik. Kondisi ini memberi daya tawar lebih kepada importir Indonesia untuk bernegosiasi mendapatkan harga lebih kompetitif, syarat pembayaran lebih fleksibel, dan layanan purna jual yang lebih baik dari produsen Tiongkok yang aktif membuka pasar baru.



2. Harga Kompetitif dan Kapasitas Produksi Massal Tiongkok

Industri manufaktur furniture Tiongkok memiliki keunggulan skala ekonomi yang sangat sulit ditandingi dalam jangka pendek. Pabrik-pabrik furniture MDF di provinsi Guangdong, Zhejiang, dan Shandong mampu memproduksi dalam volume besar dengan kontrol kualitas terstandar dan lead time pengiriman yang cepat. Bagi konsumen Indonesia segmen menengah dan menengah-bawah, ini merupakan peluang untuk mengakses perabotan rumah tangga berkualitas dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan produksi lokal berkualitas setara.

3. Optimalisasi Skema ACFTA dan FTA untuk Efisiensi Tarif

Indonesia dan Tiongkok terikat dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang memberikan tarif preferensial bagi sejumlah produk furniture. Importir yang mampu mengoptimalkan klasifikasi HS Code secara tepat dan menggunakan Certificate of Origin (CO) Form E dapat menikmati pengurangan bea masuk yang signifikan. Peluang ini sangat relevan untuk mengompensasi sebagian kenaikan beban PPN dan BMT yang mulai berlaku tahun 2025.

4. Pertumbuhan Pasar Properti dan Permintaan Domestik yang Kuat

Program pembangunan perumahan rakyat, pertumbuhan kawasan hunian perkotaan baru, serta meningkatnya penetrasi e-commerce dalam penjualan furniture menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap produk perabotan rumah tangga. Data 2025 menunjukkan bahwa nilai impor tahunan sebesar USD 7.019.536 ribu—naik +1,8% dari 2024—mengkonfirmasi ketahanan permintaan ini bahkan di bawah tekanan biaya impor yang meningkat.

5. Pengembangan Model Bisnis *Private Label* dan *OEM*

Importir furniture Tiongkok di Indonesia memiliki peluang untuk membangun portofolio produk *private label* (merek sendiri) dengan memanfaatkan kapasitas *OEM* pabrik-pabrik Tiongkok. Strategi ini memungkinkan importir membangun identitas merek lokal yang kuat, meningkatkan margin keuntungan secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga pemasok. Model bisnis ini juga memperkuat daya tawar dalam negosiasi kontrak jangka panjang.

a. *Pemanfaatan Momentum Front-Loading untuk Manajemen Stok Strategis*

Fenomena *front-loading* yang teramati pada Desember 2025 (USD 2.290.299 ribu) menunjukkan bahwa pelaku impor yang memiliki kemampuan manajemen likuiditas dan kapasitas gudang yang baik dapat mengambil keuntungan dari peluang pengadaan massal sebelum pemberlakuan tarif baru. Ke depan, strategi pengadaan antisipatif berbasis kalender kebijakan dapat dijadikan praktik standar manajemen biaya impor.

Hambatan (Barriers)

Di balik peluang yang ada, terdapat sejumlah hambatan struktural yang membatasi optimalitas dan keberlanjutan arus impor furniture dari Tiongkok ke Indonesia.

b. *Beban Fiskal Berlapis yang Memberatkan Importir*

Struktur perpajakan impor furniture 2025 merupakan hambatan fiskal paling signifikan. Akumulasi komponen Bea Masuk (5–20%), PPN Impor 12%, PPh Pasal 22 (2,5–7,5%),



dan potensi BMT berdasarkan PMK No. 4/2025 secara kumulatif dapat menambah 25–40% biaya di atas nilai CIF. Beban ini menekan margin keuntungan importir dan memperketat ruang gerak penetapan harga jual yang kompetitif di pasar eceran Indonesia. Data Semester I 2025 yang lemah mengkonfirmasi dampak langsung kenaikan beban fiskal ini terhadap keputusan impor.

c. ***Kompleksitas Regulasi Non-Tarif***

Regulasi non-fiskal menambah lapisan hambatan yang substansial. Persyaratan Sertifikat Legalitas Kayu (SVLK) bagi produk furniture berbahan kayu, Persetujuan Impor (PI) untuk kategori tertentu yang membutuhkan verifikasi di Kementerian Perdagangan, serta risiko penempatan di jalur merah Bea dan Cukai yang memerlukan pemeriksaan fisik—semuanya menambah waktu tunggu, biaya administrasi, dan risiko demurrage serta storage cost di pelabuhan. Ketidakpastian prosedural ini menurunkan efisiensi rantai pasok dan meningkatkan biaya operasional importir.

d. ***Ketergantungan Struktural Tinggi pada Satu Pemasok***

Dominasi Tiongkok yang mencapai 90,4% dari total impor furniture Asia ke Indonesia pada 2025 menciptakan risiko ketergantungan struktural yang tinggi. Ketika terjadi gangguan di sisi pemasok—seperti lonjakan harga bahan baku global, kebijakan pembatasan ekspor Tiongkok, atau gangguan logistik maritim internasional—tidak ada sumber alternatif yang memiliki kapasitas cukup untuk segera mengisi kekosongan pasokan. Vietnam, Malaysia, dan Thailand secara gabungan hanya berkontribusi 9,6% dari total impor, jauh dari cukup untuk menjadi buffer yang efektif.

6. ***Ancaman terhadap Industri Furniture Lokal***

Derasnya arus furniture MDF Tiongkok dengan harga sangat kompetitif menciptakan tekanan persaingan berat bagi industri furniture dalam negeri. Produsen lokal, yang umumnya berskala menengah-kecil dengan biaya produksi relatif lebih tinggi, menghadapi kesulitan bersaing secara harga. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlangsungan usaha industri mebel domestik yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sekaligus menciptakan dilema kebijakan antara keterbukaan impor dan perlindungan industri nasional.

7. ***Volatilitas Nilai Tukar Rupiah terhadap USD***

Seluruh transaksi impor furniture didenominasikan dalam USD, sehingga importir Indonesia sangat rentan terhadap risiko depresiasi Rupiah. Pelemahan nilai tukar secara langsung meningkatkan biaya impor dalam Rupiah meskipun harga FOB dalam USD tetap stabil, menambah ketidakpastian dalam perencanaan biaya dan penetapan harga jual. Fluktuasi kurs juga mempersulit penyusunan anggaran dan proyeksi margin keuntungan jangka panjang.

8. ***Risiko Geopolitik dan Ketidakpastian Kebijakan Global***

Dinamika hubungan perdagangan global—terutama eskalasi ketegangan AS–Tiongkok—menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi arus perdagangan furnitur secara tidak langsung. Perubahan kebijakan tarif Tiongkok sebagai respons atas tekanan AS, atau potensi pengenaan tarif balasan yang dapat memengaruhi rantai pasok global, merupakan risiko eksternal yang sulit diprediksi namun berpotensi berdampak signifikan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan produk di pasar Indonesia.



Solusi Dan Strategi

1. Solusi dan Strategi bagi Pelaku Usaha Importir

Pelaku usaha importir furniture perlu mengadopsi pendekatan strategis yang terintegrasi dalam menghadapi kompleksitas regulasi tarif impor tahun 2025. Langkah pertama yang mendesak adalah optimalisasi pemanfaatan kerangka ACFTA melalui kelengkapan Certificate of Origin (CO) Form E pada setiap pengiriman, sekaligus melakukan audit berkala atas klasifikasi HS Code guna meminimalkan risiko koreksi bea masuk dan memastikan seluruh dokumen kepabeanan terpenuhi secara akurat. Bersamaan dengan itu, importir perlu mengadopsi strategi pengadaan antisipatif berbasis kalender kebijakan tarif yang terencana—mengacu pada pelajaran empiris dari fenomena front-loading Desember 2025—sehingga peluang efisiensi biaya dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas arus kas maupun kapasitas pergudangan perusahaan. Dalam jangka menengah, diversifikasi portofolio pemasok secara bertahap ke Vietnam, Malaysia, dan Thailand untuk kategori produk tertentu perlu dirintis guna mengurangi risiko konsentrasi akibat ketergantungan struktural yang sangat tinggi pada Tiongkok. Pada saat yang sama, pengembangan model bisnis private label dan OEM bersama mitra pabrik Tiongkok akan membuka ruang peningkatan margin keuntungan yang signifikan sekaligus memperkuat posisi tawar dalam negosiasi jangka panjang. Terakhir, manajemen risiko nilai tukar melalui instrumen hedging valuta asing yang tersedia di perbankan nasional perlu diadopsi secara disiplin, didukung oleh investasi pada sistem manajemen dokumen kepabeanan yang terdigitalisasi, guna menekan biaya operasional dan memastikan kelancaran rantai pasok secara menyeluruh.

2. Solusi dan Strategi bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang terukur dan berbasis bukti dalam merespons dinamika impor furniture tahun 2025. Prioritas utama adalah pelaksanaan evaluasi komprehensif berbasis data empiris atas dampak kumulatif kebijakan tarif 2025 terhadap daya saing industri furniture domestik, keterjangkauan harga bagi konsumen akhir, dan penerimaan negara—sebagai landasan yang kokoh sebelum merumuskan kebijakan tarif lanjutan yang lebih berkeadilan. Secara paralel, reformasi prosedural terhadap regulasi non-tarif perlu segera dijalankan, khususnya melalui digitalisasi dokumen Persetujuan Impor (PI), percepatan verifikasi antarlembaga, dan harmonisasi prosedur Bea Cukai, sehingga efisiensi rantai pasok impor dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan fungsi pengawasan yang menjadi mandat regulasi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat industri furniture domestik secara sistematis melalui insentif fiskal untuk modernisasi peralatan produksi, fasilitasi sertifikasi internasional, perluasan akses pembiayaan bagi pelaku industri menengah-kecil, serta promosi aktif produk furniture Indonesia di pasar ekspor regional dan global—sehingga industri lokal mampu tumbuh secara berdaya saing di tengah tekanan persaingan produk impor yang terus menguat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap data BPS periode 2021–2025 dan kajian kebijakan yang komprehensif, penelitian ini impor furniture dari Tiongkok ke Indonesia menunjukkan pola fluktuatif berbentuk U-shape selama periode 2021–2025, dengan puncak



tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar USD 8.744.773 ribu, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar USD 6.440.245 ribu, sebelum akhirnya kembali pulih ke angka USD 7.019.536 ribu pada tahun 2025. Secara kumulatif, total impor selama lima tahun mencapai USD 36.631.272 ribu, yang membuktikan bahwa permintaan pasar Indonesia terhadap furniture asal Tiongkok bersifat persisten dan tidak mudah terguncang oleh faktor eksternal.

Pada tahun 2025 secara khusus memperlihatkan dualisme yang kontras antara kedua semesternya. Semester I mengalami pelemahan yang signifikan sebagai dampak dari penyesuaian para pelaku usaha terhadap rezim tarif baru, diperparah oleh efek musiman Tahun Baru Imlek yang menekan nilai impor pada Februari 2025 ke titik terendahnya, yakni USD 174.856 ribu. Sebaliknya, Semester II menunjukkan pemulihan yang luar biasa, dengan puncaknya pada Desember 2025 yang mencatatkan nilai impor bulanan tertinggi sepanjang periode 2021–2025 sebesar USD 2.290.299 ribu. Lonjakan dramatis ini merupakan manifestasi nyata dari front-loading effect, yakni respons rasional para pelaku usaha dalam mengantisipasi potensi pengetatan kebijakan tarif di masa mendatang.

Tiongkok secara konsisten mempertahankan dominasi absolutnya sebagai pemasok utama furniture ke Indonesia, dengan pangsa pasar mencapai 90,4% dari total impor furniture Asia pada tahun 2025. Angka ini menempatkan Tiongkok jauh di atas para pesaingnya, termasuk gabungan dari Vietnam yang hanya mencatat pangsa 1,31%, Malaysia sebesar 2,19%, dan Thailand sebesar 6,55%. Ketergantungan struktural yang sangat tinggi ini mencerminkan keunggulan komparatif Tiongkok dalam industri furniture yang belum dapat tergantikan dalam jangka pendek oleh negara pemasok manapun.

Kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan pada tahun 2025—meliputi PPN sebesar 12%, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Bea Masuk Tambahan, serta PPh Pasal 22—terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola dan strategi impor para pelaku usaha. Namun demikian, kebijakan tersebut belum berhasil menggeser dominasi Tiongkok secara fundamental. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen ganda yang di satu sisi melindungi industri furniture domestik, namun di sisi lain turut membebani rantai pasok para importir dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, antara lain redistribusi arus ekspor Tiongkok akibat penerapan tarif oleh Amerika Serikat, harga produksi massal yang tetap kompetitif, optimalisasi skema perdagangan bebas melalui ACFTA, pertumbuhan permintaan pasar domestik yang terus meningkat, serta pengembangan model bisnis berbasis private label dan OEM. Peluang-peluang tersebut dapat dioptimalkan apabila dikelola melalui strategi bisnis yang terencana, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Sejumlah hambatan struktural tetap menjadi tantangan serius yang harus dihadapi, di antaranya beban fiskal berlapis berkisar antara 25 hingga 40 persen atas nilai CIF, kompleksitas regulasi non-tarif yang mencakup persyaratan SVLK, Persetujuan Impor, dan jalur merah kepabeanan, ketergantungan pada pemasok yang sangat terpusat, tekanan persaingan yang semakin kuat terhadap industri lokal, serta risiko volatilitas nilai tukar yang sulit diprediksi. Penanganan hambatan-hambatan ini secara efektif memerlukan pendekatan multi-stakeholder yang



terkoordinasi dan sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, serta seluruh ekosistem industri furniture nasional.

SARAN

Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi komprehensif yang berbasis data terhadap dampak kumulatif kebijakan tarif impor furniture tahun 2025, khususnya dalam kaitannya dengan daya saing industri mebel nasional dan tingkat kesejahteraan konsumen. Evaluasi menyeluruh ini menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan sebelum pemerintah memformulasikan kebijakan tarif lanjutan, agar setiap regulasi yang lahir berikutnya benar-benar terukur, berbasis bukti empiris, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak—baik pelaku industri hulu maupun konsumen akhir.

Para pelaku usaha importir dan asosiasi industri, khususnya Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), perlu berinisiatif membangun sebuah platform kolaborasi yang sistematis dan berkelanjutan. Platform tersebut idealnya berfungsi sebagai wadah berbagi informasi mengenai perkembangan regulasi kepabeanan terkini, peluang negosiasi strategis dengan mitra bisnis dari Tiongkok, serta praktik terbaik dalam manajemen dan efisiensi biaya impor. Dengan adanya ekosistem kolaborasi yang solid, kapasitas adaptasi industri secara kolektif dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi menghadapi dinamika regulasi dan pasar secara terpisah dan reaktif.

Penelitian lanjutan yang lebih mendalam sangat diperlukan dengan memperluas cakupan analisis ke dimensi kualitatif yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh pendekatan kuantitatif. Agenda riset tersebut mencakup studi lapangan langsung terhadap para importir untuk menangkap realitas operasional yang sesungguhnya, analisis rantai nilai secara menyeluruh atas alur perdagangan furniture berbahan MDF antara Indonesia dan Tiongkok, serta pengkajian yang seksama terhadap dampak sosial-ekonomi kebijakan tarif terhadap tenaga kerja di sektor furniture. Dengan pendekatan penelitian yang lebih holistik dan integratif tersebut, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan di masa mendatang akan memiliki landasan yang jauh lebih kuat, relevan, dan mampu menjawab kompleksitas tantangan industri furniture nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). Data Nilai Impor Furniture Indonesia Menurut Negara Asal, Periode 2021–2025. Jakarta: BPS Republik Indonesia.
- Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). (2025). Laporan Tahunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia 2025. Jakarta: HIMKI.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Bea Masuk Tambahan atas Impor Barang Tertentu. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2022). *International Economics: Theory and Policy* (12th ed.). New York: Pearson Education.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.



Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

World Trade Organization (WTO). (2025). *World Trade Report 2025: Navigating Uncertainty in a Changing Trade Landscape*. Geneva: WTO Publications.